OPTIMALISASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DHEDEK KURNIADIYANTO

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri Hilir
Tembilahan808@gmail.com

ALI AZHAR

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri Hilir
aliazharunisi28@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam perjalanan Desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahterah.

Perumusan masalah berdasarkan penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir, Bagaimana Implementasi Pengawasan pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris adalah deskriptif kualitatif empiris, karena mengungkapkan fenomena masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Dari hasil penyajian data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan setara dengan pemerintah desa sebaga mitra kerja yang mempunyai wewenang dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, optimalisasi dalam pengawasan pembangunan didesa di kabupaten Indragiri Hilir masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi, pemahaman dan kontroling selaku peran Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci: *Kedudukan, Kewenangan, dan Pengawasan BPD*

ABSTRACT

The Indonesian state as a unitary state in the form of a republic adheres to the principle of decentralization in organizing government at the regional level by providing opportunities and freedom for regions to implement regional autonomy. Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that, the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas and the provincial areas are divided into districts and cities, each of which is a province, district and city. has a regional government regulated by law. In the process, villages develop in various forms so they need to be protected and empowered so that they become strong, advanced, independent and democratic so as to create a strong foundation for carrying out governance and development towards a just, prosperous and prosperous society.

The formulation of the problem based on this research can take the problem formulation as follows: What is the position and authority of the Village Consultative Body in Supervising Village Development in Indragiri Hilir Regency, How is the Implementation of Village Development Supervision in Indragiri Hilir Regency. This type of research is field research and the type of research used in Empirical Legal research is empirical qualitative descriptive, because it reveals problem phenomena based on scientific logic. From the results of the presentation of research data and discussions that have been carried out, conclusions can be drawn from the position and authority of the Village Consultative Body in Supervising Village Development. The Village Consultative Body has an equal position with the village government as a working partner who has the authority to supervise the performance of the village head in implementation. development, optimization in monitoring development in villages in Indragiri Hilir district is still not optimal due to lack of communication, understanding and control as the *role of the Village Consultative Body*.

Keywords: Position, Authority and Supervision of BPD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang Sebagai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Menurut Tjahya Supriatna “Pemerintahan daerah adalah unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan sub sistem pemerintahan negara. Oleh karena tujuan yang diemban oleh pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintahan pusat, yaitu mewujudkan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945”.² Masyarakat tersebut lalu disebut dengan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintah terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika di ibaratkan dalam anatomi tubuh desa diibaratkan sebagai kaki jadi

¹ B.N Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 8.

² Tjahya Supriatna, System Administrasi Pemerintahan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 86.

bisa dikatakan bahwa desa merupakan motor penggerak dalam suatu Negara. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, dalam teritori Negara Indonesia terdapat 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tuntutan regulatif untuk menjadi aktor baru didesa sebagai kekuatan pengimbang aktor pemerintah desa, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpeluang secara luas dalam proses politik desa, karena Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang berwenang untuk mengawal pelaksanaan politik serta demokrasi yang ada di desa. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh penulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Indragiri Hilir, yang pada kenyataannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga untuk mengawasi dalam pembangunan Desa belum terlaksana secara maksimal. Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ternyata masih di lingkupi sejumlah problem kontradiktif khususnya di setiap desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan dengan baik menjadi tanggung jawab yang besar bagi BPD untuk mewujudkannya. Banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan dengan baik menjadi tanggung jawab yang besar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkannya. Di dalam Pasal 68 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwasanya masyarakat desa berhak meminta dan

mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Masyarakat desa juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.³ Di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul penelitian tentang “Optimalisasi Kedudukan Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pengawasan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mengoptimalisasikan kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Desa Di kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam mengoptimaslisasikan kedudukan dan kewenangan dalam pengawasan pembangunan?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris adalah deskriptif kualitatif empiris, kerana mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Data dalam penelitian kualitatif empiris terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus yang di lakukan penelitian. Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena

---

³ Pasal 68 Ayat 1, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai “Optimalisasi Kedudukan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir”.

II. PEMBAHASAN

A. Otonomi Daerah Di Indonesia

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi struktural politik pada waktu itu. Begitu pula halnya dengan pemerintahan di daerah, sebagai konsekuensi logis dari isi dan penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan mengaturnya.⁴ Pemberlakuan otonomi

daerah atau sistem desentralisasi di Indonesia, sebagai suatu negara kesatuan mulai berlaku dan berkembang mulai dari berahirnya orde baru, dan berganti reformasi yang di tandai dengan pemberhentian Presiden ke-2 yaitu soeharto.

Bangsa Indonesia tengah menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan pasif yang pernah ada dalam sejarah. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara indonesia, dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.⁵ Pembangunan daerah juga tidak berkembang dan masalah didaerah belum juga dapat terselesaikan hingga saat ini. Meskipun keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah tidak cukup meredam

⁴ Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.2.

⁵ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa*, *Jurnal Politik Profetik* Volum 1 Nomor 1 Tahun 2013, hlm.1.

tuntutan aspirasi daerah.⁶

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Menurut C.S.T. Kansil Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Otonomi desa di akui secara riil/nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administrasi kabupaten atau kecamatan.⁸ Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi tawaran pada pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang badannya bentuk filosofi keragaman pada

Kedaulatan rakyat, Demokrasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerataan dan Keadilan.⁹ Asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya.¹⁰

B. Optimalisasi Kedudukan dan Kewenangan BPD Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir

Optimalisasi peran BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif.

Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap pembagian kekuasaan pada pemerintah desa. Meski

⁶ Pheni Chalid, Otonomi Daerah Masalah Pemberdayaan dan Konflik, Kemitraan, Jakarta, 2005, hlm.21.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Christine S.T. Kansil, Hukum Adminitrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.116.

⁹ Undang-Undang Desa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁰ 10 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pada prinsipnya ada pembagian kekuasaan, tetapi kekuasaan legislatif yang berarti Badan Permuayawaratan Desa bukanlah wadah representasi dan arena *check and balances* terhadap kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintah sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam peraturan pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai lembaga legislasi seperti yang tertulis di UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa di Pasal 55, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah desa akan tetapi

BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-Undang ini semakin menguat.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden, maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama dilapangan, maka dapat diberikan suatu analisa tentang” Optimalisasi Kedudukan Dan Kewenangan BPD Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir”, data penelitian yang nantinya digunakan menjawab permasalahan penelitian. Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data, yakni observasi dan wawancara. Demikian juga halnya, permasalahan utama yang hendak dijawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa pengawasan

pembangunan di Desa.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan menjawab permasalahan secara mendalam, penulis pertama-tama mengawalinya dengan mengumpulkan berbagai data. Kemudian melakukan sejumlah wawancara yang berhubungan dengan Berikut ini akan disajikan hasil penelitian lapangan, penelaahan dokumen-dokumen instansi terkait hasil wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yang disusun berdasarkan penggunaan indikator implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan pembangunan, penulis melakukan wawancara peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan. Sebelum menanyakan lebih jauh tentang BPD peneliti menanyakan kepada Bapak Idham Halid selaku Ketua PD PABPDSI Kabupaten Inhil tentang Bagaimana pandangannya terhadap Rekan-rekan BPD disetiap Desa dalam Pengawasan pembangunan Desa , beliau menjawab :*“Kondisi saat ini BPD disetiap desa masih belum maksimal dalam pengawasan pembangunan desa*

dikarenakan adanya beberapa ketua BPD Desa yang belum mengerti dalam pemahaman tugas dan tanggung jawabnya bahkan terkadang kurang komunikasi kepada kepala Desa sehingga sinegritas selaku mitra kerja belum terlaksana, Maka hal tersebut terjadi suatu permasalahan dalam pembangunan dikarenakan BPD kurang kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.”¹¹

Selanjutnya bagaimana pandangan Bapak M.apip selaku Kepala Desa Bagan Jaya bahkan pengurus APDESI Kab.Inhil tentang peranan BPD, kepada penulis beliau mengatakan:

“Peranan BPD sangat penting dalam terciptanya pembangunan yang berhasil. Untuk itu, BPD betul-betul harus serius dalam pengawasan pembangunan desa secara optimal”¹² Untuk mendapat gambaran yang lebih mendalam mengenai peran BPD dalam pengawasan pembangunan di Desa, peneliti mengumpulkan data-data penelitian berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menjelaskan fungsi-fungsi BPD secara jelas berikut hak serta kewajiban BPD.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ketua PD PABPDSI Kab.Inhil, 26 November 2024.

¹² Hasil Wawancara Dengan Kades Bagan Jaya Kecamatan Enok, 26 November 2024.

Adapun ketersediaan tugas dan fungsi suatu lembaga dalam pengawasan pembangunan menjamin terwujudnya pembangunan yang baik bila tidak di implementasikan. Begini pernyataan bapak Martunis sebagai Ketua BPD Desa Mompa Kecamatan Tempuling sekaligus pengurus PD PABPDSI Kab.Inhil, Kepada Peneliti dalam wawancara:

“Secara umum, kami selaku perangkat BPD telah menjalankan tugas dan fungsi kami, seperti menyediakan wadah pertemuan musrembang yang diadakandi desa Dan dalam rapat yang berhubungan dengan pembangunan desa Jika pemerintah desa tidak melakukan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan tentu ini akan menjadi temuan bagi Desa.”¹³

Seanjutnya peneliti mewawancarai Bapak H.dwi budy yanto selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir tentang peran BPD dalam pengawasan pembangunan Desa, kepada penulis mengatakan:

“BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang beranggotakan keterwakilan masyarakat, adapun aturan yang dikeluarkan

pemerintah tujuannya untuk mempertegas kinerja BPD, BPD adalah mitra kerja kepala desa bukan bawahan tetapi selaku mitra kerja harus berdiri sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan desa, BPD Dikabupaten Inhil ini masih belum melaksanakan peran dan fungsi selaku perwakilan rakyat didesanya. Bpd Ini punya tugas mengawal dan menyerap aspirasi. Maka setelah dilantik tentu pemerintah sudah memberi pembekalan kepada BPD hanya saja Tingkat pemahaman berbeda-beda sehingga hal membuat pemahaman secara menyeluruh belum optimal.”¹⁴

Pelaksanaan Pengawasan dalam upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik suatu informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apa yang telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Mompa Kecamatan Tempuling Kab.Inhil, 27 November 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas PMD Kab.Inhil, 05 Desember 2024.

lapisan masyarakat bisa tertampung. Dimana tahapan penyusunan rancangan program kerja Desa tersebut ialah :

1. Di laksanakan musyawarah masyarakat oleh pemerintah Desa
2. Setelah diadakan musyawarah hasil keputusan di ajukan ke Kabupaten.
3. Setelah diajukan dan di setuju oleh Pemerintahan Kabupaten Pemerintah Desa kembali musyawarah untuk membahas kembali rancangan program kerja.

Setelah rancangan program kerja pemerintah desa telah disepakati kepala desa memutuskan siapa yang akan menjalankan program tersebut biasanya kepala desa melibatkan pihak ketiga dan masyarakat dalam menjalankan program itu, penulis mendapatkan keterangan dari Bapak Mhd.Arifin Ketua BPD Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan :

“Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam merancang program kerja berjalan dengan baik dikarenakan kami dari pemerintah desa dan BPD saling percaya dan kami meganut system kekeluargaan yang penting kami tidak menyalahi aturan, kalau dalam pengawasan pembangunan desa ini

biasanya BPD profesional bahkan kami saling bahu-membahu mencari solusi jika ada permasalahan.”¹⁵

Mempedomani tahapan penyusunan rancangan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa fungsi BPD dalam pengawasan tahapan pembangunan. Dimana dalam menyampaikan gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Sedangkan dalam penerapannya Badan Permusyawaratan Desa kurang menjalankan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur tentang fungsi dan tugas BPD.

---

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan KetuaBPD Desa Sungai Gantang Kecaamatan Kempas, 26 November 2024

C. Kendala dan Upaya Dalam Optimalisasi Kedudukan Dan Kewenangan BPD Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir

Suatu program dan kegiatan yang dilakukan kepala desa selalu diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna minimalis penyelewengan kewenangan dan mengetahui kinerja yang dilakukan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- 3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- 4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- 5) Menindak lanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

D. Faktor-Faktor Pendukung yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa:

- a) Tingkat Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dari data di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat mendukung dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah terbukti kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait. Dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dilakukan begitu saja, orang-orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa.

b) Masyarakat

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi kinerjanya tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini sama bahwa “Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya”. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan- pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat desa.

c) Partisipasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang masih kurang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk dapat melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Dari hasil pengamatan peneliti bahwa pihak anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) kurang berpartisipasi dalam rangka rapat yang telah diadakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sangat mempengaruhi kurang maksimal hasil rapat yang ada, karena dapat dikatakan bahwa tidak semua pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dan melaksanakan fungsinya secara maksimal.

E. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Indragir Hilir pada umum sebagai berikut :

1. BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terhadap Peraturan Desa
3. Faktor internal yang terdapat di BPD Kurangnya SDM
4. Faktor Eksternal yang berasal dari luar BPD
5. Faktor kurangnya kemampuan anggota BPD.
6. Faktor kurang ketidak disiplin anggota BPD
7. Faktor penolakan masyarakat desa di daerah pembangunan

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya BPD untuk percepatan pengawasan pembangunan desa adalah:

1. Upaya pertama yaitu meningkatkan kemampuan anggota BPD, dalam hal ini BPD desa dengan cara memberikan pelatihan kepada seluruh anggota BPD untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya, selain itu bisa juga pelatihan yang diadakan oleh

pemerintahan desa itu sendiri dengan mengundang pakar agar BPD khususnya dan seluruh aparatur pemerintahan desa umumnya mengetahui peran dan fungsinya masing- masing.

2. Upaya kedua yaitu meningkatkan kreatifitas anggota BPD, dalam hal ini BPD desa harus melakukan kegiatan/pelatihan khusus untuk meningkatkan kreatifitas anggota BPD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa serta pemerintah desa juga meningkatkan monitoring dan pengawasan kinerja pemerintah agar menjalankan peran dan fungsinya dengan benar sesuai yang diharapkan oleh undang-undang memaksimalkan peran pendamping desa untuk memberikan pendamping dan bimbingan secara intens kepada anggota BPD dalam rangka upaya pengawasan pembangunan desa.
3. Upaya ketiga yaitu meningkatkan kedisiplinan anggota BPD, dalam hal ini sebagai ketua BPD dan sekretaris BPD lebih memperhatikan anggotanya untuk lebih disiplin dalam menjalannya peran dan fungsinya, karena di dalam kegiatan atau percepatan pembangunan desa antara ketua, sekretaris dan anggota harus saling sepakat, maka

kehadir tepat waktu sangat dibutuhkan untuk memusyawahkan kegiatan khususnya pembangunan desa. Serta sebagai anggota BPD haruslah hadir tepat waktu dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan karena selain mempermudah dan juga mempercepat kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Upaya keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk dalam pembangunan desa, dalam hal ini BPD haruslah membujuk masyarakat dengan baik agar kegiatan percepatan pembangunan desa terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, selain itu masyarakat juga harus saling mengerti apa yang telah direncanakan oleh BPD dalam pembangunan desa. Contohnya seperti pelebaran jalan, masyarakat harus sepakat dan harus mengihklaskan tanahnya beberapa meter untuk pembangunan pelebaran jalan, karena dibalik pelebaran jalan tersebut adalah agar setiap masyarakat desa Tanah Rakyat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya macet ataupun kejadian yang tidak diinginkan.

III. KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selalu dianggap masyarakat hanya sebagai lembaga formalitas dalam

sebuah penyelenggaran pemerintahan desa bisa dihilangkan dengan hadirnya penelitian ini yang memfokuskan tentang Tufoksi yang di emban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang Optimalisasi Kedudukan Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pembangunan Desa DiKabupaten Indragiri Hilir sudah dilakukan dengan cukup baik walaupun belum Optimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga legislatif dalam sebuah pemerintahan desa sudah sekiranya menjalankan tufoksinya dengan cukup baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari cukup berperannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga musyawarah desa dalam mekanisme pembangunan desa dinilai sudah berjalan dengan cukup baik sekalipun belum optimal.
2. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) melakukan pengawasan terhadap kepala desa, dalam pembangunan di desa masih belum optimal, hal ini terlihat dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan, terhadap berlangsungnya pembangunan di Desa hanya saja peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam memberikan arahan dan saran apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepala desa masih belum maksimal.

3. Kurang optimalnya peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diakibatkan terdapatnya hambatan-hambatan berupa rendahnya kualitas sumber daya masyarakat desa yang ada sehingga kurang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga motivasi, antusias, kreatifitas dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian fakta dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka Penulis memberikan saran terkait "Optimalisasi Kedudukan dan Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan

Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir" sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kerjasama antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kepala Desa sebagai mitra yang sejajar dengan saling menghormati dan saling membantu dalam pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa dengan sebaik mungkin.
2. Pemerintah Kabupaten agar meningkatkan kualitas SDM anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsinya minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten, serta memberikan pedoman modul-modul perihal uraian Tupoksinya tersebut.
3. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pemerintah desa agar dapat mensosialisasikan pembangunan desa dengan cara menyampaikan langsung ke tingkat dusun pada kegiatan forum-forum terbuka di balai dusun. Atau jika perlu dilakukan pengumuman melalui

selebaran ke penduduk Sehingga masyarakat umum dapat memahami gambaran menyeluruh terhadap dampak positif dari kebijakan tersebut agar partisipasi dan dukungan dari masyarakat dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B.N Marbun, 2010, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Christine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Erni Trisnawati, Sule, 2005, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.
- Fachruddin Irfan, 2004, *"Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah"*, PT. Alumni, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- HAW.Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di ndonesia*, PT. Raja GravindoPersada, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indoharto, 2002, *Usaha memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.

Maman Ukas, 2004, *Manajemen Prinsip dan Aplikasi*, Agnini, Bandung.

Miriam Budiarto, 2002, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Neon Muhajir, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Pemerintahan Desa*, Nusa Media, Jakarta.

Pheni Chalid, 2005, *Otonomi Daerah Masalah Pemberdayaan dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta

Tjahya Supriatna, 1996, *System Administrasi Pemerintahan Daerah*, Bumi aksara, Jakarta.

Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tentang Perubahan.

Permendagri 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pokok- pokok Pemerintahan Wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

C. Hasil Interview

Wawancara Dengan Ketua PD PABPDSI Kabupaten Indragiri Hilir, 26 November 2024.

Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas, 26 November 2024

Wawancara Dengan Kepala Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok, 26 November 2024.

Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Mompas Kecamatan Temp Kab.Inhil, 27 November 2024.

Wawancara Dengan Kepala Dinas PMD Kab.Inhil, 05 Desember 2024.